

## Strategi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan KTH Maju Bersama Desa Air Tenam Kabupaten Bengkulu Selatan

Dwi Maryani<sup>a\*</sup>, Gunggung Senoaji<sup>b</sup> & Yurike<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu UPTD KPHL Bengkulu Selatan, Pasar Manna, Bengkulu 38511, Indonesia

<sup>b</sup>Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Bengkulu 38371, Indonesia

<sup>c</sup>Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Bengkulu 38371, Indonesia

\*Corresponding author: dwimaryani442@gmail.com

Submitted: 2025-05-13. Revised: 2025-09-20. Accepted: 2025-10-31

### ABSTRACT

*This study aims to determine the socio-economic characteristics of the members of the Maju Bersama KTH, the performance of the Maju Bersama KTH, the success rate of social forestry management in the Maju Bersama KTH IUPHKm and the strategy for managing social forestry in the Maju Bersama KTH IUPHKm in Air Tenam Village, Ulu Manna District, South Bengkulu Regency, Bengkulu Province. This study was conducted from October to November 2024 in the Maju Bersama KTH IUPHKm, Air Tenam Village, South Bengkulu Regency, Bengkulu Province. The assessment of KTH performance is in accordance with the regulation of the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia number P.89 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 8/2018. The analysis method used for socio-economic characteristics, performance assessment and success rate of KTH is a qualitative and quantitative descriptive method. While the strategy for managing social forestry in community forests is analyzed using SWOT. The results of the study showed that KTH Maju Bersama had an institutional management performance score of 205 (56.94%), area management of 131.28 (65.64%), and business management of 102.09 (23.20%), with a total score of 438.37 (48.60%), so it is included in the Madya (Good/Medium) class KTH. The success of social forestry management shows that the majority of respondents (78%) achieved the successful category. The position of the forest management strategy is in quadrant II with the Diversification strategy.*

**Keywords:** Social forestry, Management strategies, Success of social forestry

### PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki manfaat besar bagi manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat langsung yang dapat diperoleh dari hutan mencakup hasil kayu, keberadaan satwa, dan sumber daya tambang, sementara manfaat tidak langsungnya meliputi fungsi rekreasi, pengaturan serta perlindungan tata air, serta pencegahan erosi. Kesadaran akan pentingnya hutan dalam pemanfaatan dan pengelolaannya sangat berpengaruh terhadap kelestariannya. Oleh karena itu, pemanfaatan kawasan hutan seharusnya dilakukan dengan tetap menjaga karakteristik, sifat, dan kerentanannya tanpa mengubah fungsi utamanya. Namun, dalam praktiknya, implementasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang menekankan keseimbangan manfaat lingkungan, sosial, dan ekosistem secara berkelanjutan, masih belum berjalan optimal. Akibatnya, luas kawasan hutan yang mengalami degradasi dan kerusakan terus meningkat. Berdasarkan analisis Auriga Nusantara, deforestasi di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 257.384 hektar, dengan sebagian besar terjadi di kawasan hutan negara (Hariadi et al., 2023).

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), luas hutan yang mengalami kerusakan di provinsi ini pada tahun 2024 mencapai sekitar 13.497 hektar. Kerusakan tersebut paling banyak terjadi di kawasan Hutan Lindung, yaitu seluas 7.523 hektar, diikuti oleh Hutan Produksi Terbatas dengan luas 5.455 hektar, serta Hutan Produksi seluas 520 hektar. Faktor utama yang menyebabkan kerusakan ini adalah aktivitas perambahan hutan dan pembalakan liar yang tersebar di sembilan kabupaten di Bengkulu (DLHK, 2024). Meningkatnya kegiatan illegal logging dan perambahan hutan ini sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Bertambahnya populasi berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan lahan, kayu bakar, material bangunan, serta lahan permukiman. Akibatnya, kawasan hutan menjadi sasaran utama untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut (Wijayanti et al., 2023).

Kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan hutan di Indonesia disesuaikan dengan jenis hutan yang ada. Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2023 mengatur bahwa pemanfaatan hutan lindung harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi utamanya. Pemerintah menginisiasi program Perhutanan Sosial yang memberikan akses kepada masyarakat untuk

mengelola hutan secara berkeadilan dan berkelanjutan, serta meningkatkan kapasitas usaha melalui pemanfaatan sumber daya hutan tanpa mengabaikan kelestariannya. Program Perhutanan Sosial mencakup lima skema izin, yaitu Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Lingkungan. Di antara skema-skema tersebut, HKm memiliki peran yang signifikan dalam mendukung keberhasilan program ini. Pemberian izin HKm bertujuan untuk memperkuat hak pengelolaan masyarakat atas kawasan hutan, mengurangi potensi konflik, serta memastikan kelestarian fungsi hutan. Dengan adanya skema ini, masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan sekaligus berperan aktif dalam menjaga ekosistem hutan (Permen LHK No 09, 2021)

Provinsi Bengkulu telah mengimplementasikan program Perhutanan Sosial, termasuk skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Berdasarkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Bengkulu Selatan Tahun 2018–2027 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas daratan Provinsi Bengkulu mencapai 2.007.223 hektar, di mana 46,1% atau sekitar 924.631 hektar merupakan kawasan hutan. Dari total kawasan hutan tersebut, 28% (506.307 hektar) tergolong sebagai hutan lindung, 49% (897.103 hektar) merupakan kawasan suaka alam dan pelestarian alam, 19% (345.626 hektar) merupakan hutan produksi terbatas, 3% (51.632 hektar) masuk dalam kategori hutan produksi, dan 1% (23.344 hektar) merupakan hutan produksi yang dapat dikonversi (BPS, 2023). Keberadaan skema HKm di Provinsi Bengkulu diharapkan dapat memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan serta mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 784/Menlhut-II/2012, kawasan hutan di Kabupaten Bengkulu Selatan mencakup hutan konservasi, hutan produksi, dan hutan lindung. Terdapat dua kawasan hutan konservasi, yaitu Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Rabang dan Taman Wisata Alam (TWA) Kayu Ajaran. Sementara itu, hutan lindung meliputi Hutan Lindung (HL) Bukit Riki, Bukit Sanggul, dan Rajamendara. Adapun kawasan hutan produksi terdiri dari Hutan Produksi (HP) Air Bengkenang serta Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bukit Rabang, Peraduan Tinggi, dan Air Kedurang. Secara keseluruhan, wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) di daerah ini memiliki luas 48.686 hektar, dengan 32.741 hektar di antaranya berupa hutan lindung dan 15.946 hektar merupakan hutan produksi (RPJP KPHL, 2015).

Berdasarkan data pemegang izin usaha pemanfaatan hutan di wilayah KPHL Bengkulu Selatan, terdapat 18 izin perhutanan sosial dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKm) dengan total luas 5.787,84 hektar. Izin tersebut tersebar di kawasan Hutan Lindung Bukit Riki serta kawasan Hutan Produksi Terbatas Kedurang dan Peraduan Tinggi. Selain itu, terdapat Hutan Tanaman Rakyat dengan luas 3.947 hektar dan Hutan Desa seluas 952 hektar (DLHK Provinsi Bengkulu, 2024).

Salah satu program Perhutanan Sosial dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) di KPHL Bengkulu Selatan adalah IUPHKm KTH Maju Bersama di Desa Air Tenam, Kecamatan Ulu Manna. Izin ini diberikan melalui Surat Keputusan Nomor 6243/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/2019 tanggal 19 Juli 2019, dengan luas wilayah ±1.269 hektar. Selama lima tahun terakhir, IUPHKm KTH Maju Bersama telah aktif mengelola kawasan hutan dengan pendampingan dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Diharapkan dalam kurun waktu tersebut, pengelolaan HKm KTH Maju Bersama telah berkembang dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan anggota kelompok, sekaligus menjaga fungsi hutan sesuai dengan tujuan Hutan Kemasyarakatan, yaitu menciptakan keseimbangan antara kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, hingga saat ini belum dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja Kelompok Tani Hutan Maju Bersama. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan yang lebih optimal guna memastikan keberhasilan program Perhutanan Sosial dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan ini.

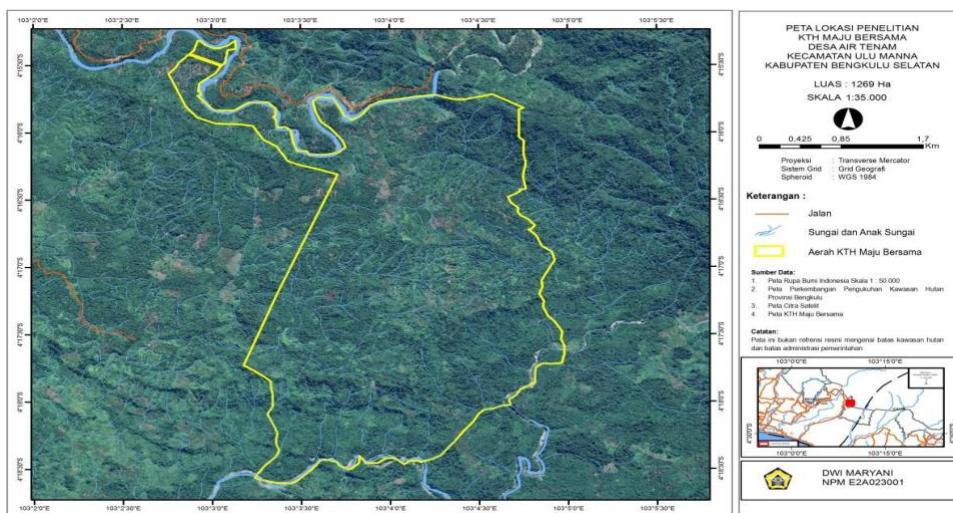
Strategi pengelolaan Perhutanan Sosial pada IUPHKm KTH Maju Bersama di Desa Air Tenam, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi langkah penting dalam memastikan keberlanjutan program serta kesejahteraan masyarakat setempat. Pengelolaan yang efektif harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk karakteristik sosial ekonomi anggota kelompok, kinerja pengelolaan hutan, serta keberhasilan program dari segi ekologi dan ekonomi. Karakteristik sosial ekonomi anggota KTH Maju Bersama menjadi faktor utama dalam merumuskan strategi yang tepat. Pemahaman terhadap tingkat pendapatan, mata pencarian, serta akses terhadap sumber daya dan teknologi akan membantu dalam menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, evaluasi kinerja kelompok dalam mengelola kawasan hutan juga diperlukan untuk mengidentifikasi kendala serta peluang yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan.

Keberhasilan pengelolaan Perhutanan Sosial dapat ditinjau dari dua aspek utama, yaitu ekonomi dan ekologi. Dari sisi ekonomi, keberhasilan dapat diukur melalui peningkatan pendapatan anggota kelompok serta kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan hutan. Sementara dari sisi ekologi, kelestarian hutan menjadi indikator utama yang mencerminkan keberhasilan program ini. Pengelolaan yang baik akan mampu menjaga fungsi ekosistem hutan, menekan laju deforestasi, serta mempertahankan tutupan lahan yang berkelanjutan.

Adanya penelitian ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengelola Perhutanan Sosial di wilayah tersebut. Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk memastikan bahwa kawasan hutan tetap terjaga fungsinya sesuai dengan prinsip kelestarian. Melalui pendekatan yang terarah dan berbasis data, program Perhutanan Sosial dapat menjadi solusi yang berkelanjutan dalam mendukung keseimbangan antara kepentingan ekologi dan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

## MATERI DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan November 2024 di IUPHKm KTH Maju Bersama Desa Air Tenam Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu (Gambar 1). Penelitian ini menggunakan dua teknik pengambilan sampel, yaitu purposive sampling dan simple random sampling, untuk mengevaluasi kinerja Kelompok Tani Hutan (KTH) Maju Bersama dari aspek kelembagaan, usaha, dan kawasan. Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan 3 responden dari unsur pengurus KTH, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh data mendalam terkait kinerja kelembagaan (Sugiyono, 2020). Sementara itu, *simple random sampling* digunakan untuk menentukan responden dari kalangan anggota KTH. Dari total 216 anggota, diambil 20% sebagai sampel, sehingga diperoleh 43 responden. Teknik ini dipilih agar setiap anggota memiliki peluang yang sama untuk menjadi responden (Machali, 2021; Firmansyah & Dede, 2022). Total keseluruhan responden dalam penelitian ini berjumlah 46 orang.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam penilaian kinerja Kelompok Tani Hutan (KTH) Maju Bersama adalah metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif yang merupakan metode berupa uraian-uraian kalimat yang menggunakan perhitungan angka sederhana. Data yang diperoleh dari responden dikelompokan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Data yang dikumpulkan di lapangan selanjutnya dianalisis secara deskriptif berdasarkan nilai skor dan predikat kinerja kelompok tani hutan sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan republik Indonesia nomor P.89/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/8/2018 tentang pedoman kelompok tani hutan yang berisi klasifikasi kelas kelompok tani hutan berdasarkan hasil dan penilaian kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha yang hasil dari skoring penilaian dapat diklasifikasikan menjadi kelas pemula, kelas madya, dan kelas utama. Hasil skor aspek kajian pada setiap variabel dijumlahkan kemudian dilakukan penjumlahan total nilai dari setiap aspek kajian yang bertujuan untuk mengetahui nilai predikat kinerja secara keseluruhan serta pengelompokan kelas kelompok tani hutan. Rekapitulasi skor aspek kajian kinerja KTH disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi skor aspek kinerja kelompok Tani Hutan

Aspek Kajian	Nilai Maksimal Indikator
Kelola Kelembagaan	360
Kelola Kawasan	200
Kelola Usaha	440
Total	1000

Berdasarkan Permen LHK No. P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018, klasifikasi Kelompok Tani Hutan (KTH) dilakukan untuk menilai kinerja kelompok dalam mengelola kelembagaan, kawasan, dan usaha. Hasil penilaian ini digunakan untuk menentukan kelas KTH, yang terdiri atas tiga kategori, yaitu kelas pemula, kelas madya, dan kelas utama.

Adapun ketentuan klasifikasi kelas KTH berdasarkan hasil penilaian adalah sebagai berikut:

- KTH kelas pemula, jika memperoleh skor kurang dari 350.
- KTH kelas madya, jika memperoleh skor 350 hingga 700.
- KTH kelas utama, jika memperoleh skor lebih dari 700.

Untuk merekomendasikan strategi pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKM) dalam penelitian ini menggunakan analisis SWOT. Menurut Rangkuti (2018) analisis SWOT merupakan suatu kegiatan mengidentifikasi secara sistematis dari berbagai faktor guna merumuskan strategi perusahaan. Analisis SWOT melibatkan empat unsur utama: *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman). Analisis ini bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kinerja Kelompok Tani Hutan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelompok Tani Hutan (KTH) Maju Bersama memperoleh skor kinerja kelola kelembagaan sebesar 205 atau 56,94% dari nilai maksimal indikator, skor kinerja kelola kawasan sebesar 131,28 atau 65,64%, dan skor kinerja kelola usaha sebesar 102,09 atau 23,20%. Total akumulasi skor dari ketiga aspek tersebut adalah 438,37, yang setara dengan 48,60% dari total nilai maksimal indikator yang ditetapkan. Berdasarkan skor tersebut, KTH Maju Bersama dikategorikan dalam kelas Madya (Baik/Menengah). Klasifikasi ini menunjukkan bahwa kelompok telah mampu menjalankan fungsi pengelolaan kelembagaan, kawasan, dan usaha secara cukup baik. Meskipun belum mencapai kategori kelas Utama (dengan skor di atas 700), capaian ini mencerminkan adanya kapasitas dan potensi yang dapat terus ditingkatkan melalui pendampingan, penguatan kelembagaan, dan pengembangan unit usaha yang lebih optimal. Dengan demikian, KTH Maju Bersama berada pada jalur yang tepat menuju pengelolaan hutan kemasyarakatan yang berkelanjutan dan produktif.

Tabel 2. Kelas Kinerja KTH Maju Bersama

No	Kriteria Penilaian	Nilai Maksimal Indikator	Jumlah Skor	Bobot Skor (%)
1	Kelola Kelembagaan	360	205,00	56,94
2	Kelola Kawasan	200	131,28	65,64
3	Kelola Usaha	440	102,09	23,20
	Jumlah	1000	438,37	48,60

Sumber : Data Primer 2024

### Analisis Strategi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

#### Faktor Internal

Berdasarkan hasil analisis matriks IFAS terhadap strategi pengelolaan hutan kemasyarakatan pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Maju Bersama di Desa Air Tenam, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan diperoleh total skor dari 11 faktor yang menjadi kekuatan dengan total skor 2,03 serta terdapat 8 faktor yang menjadi kelemahan dengan total skor sebesar 0,57. Dengan demikian, nilai total IFAS adalah 1,46, yang menunjukkan bahwa secara internal, KTH Maju Bersama memiliki lebih banyak faktor kekuatan dibandingkan dengan kelemahan yang ada.

Tabel 3. Matrik IFAS strategi pengelolaan hutan kemasyarakatan

Kekuatan	Bobot	Rating	Skor
1. Dasar hukum pendirian KTH	0,08	4	0,32
2. Struktur kelembagaan KTH	0,05	4	0,21
3. Rencana kegiatan KTH	0,05	4	0,21
4. Aturan yang dimiliki KTH	0,05	4	0,21
5. Anggota yang potensial menjadi kader pengurus KTH	0,05	3	0,16
6. Pemantauan dan evaluasi kegiatan kelompok	0,04	3	0,12
7. Kelengkapan administrasi kelompok	0,04	3	0,12
8. Keikutsertaan dalam kegiatan peningkatan kapasitas	0,05	4	0,21
9. Kelengkapan kesekretariatan KTH	0,08	3	0,24
10. Jenis pelatihan bidang kehutanan yang diikuti	0,04	3	0,12
11. Jumlah kelompok baru karena berkembangnya usaha atau terinspirasi dari kelompok yang sudah ada	0,04	3	0,12

Total Kekuatan				2,03
Kelemahan				
1. Kehadiran anggota dalam pertemuan KTH	0,08	1	0,08	
2. Frekuensi pertemuan KTH	0,04	2	0,08	
3. Pemahaman anggota terhadap batas-batas wilayah kelola dalam batas kawasan hutan di sekitarnya	0,05	2,33	0,12	
4. Keikutsertaan kaum wanita dalam kepengurusan dan anggota kelompok	0,04	2	0,08	
5. Kehadiran pengurus dalam pertemuan KTH	0,08	1	0,08	
6. PKSM yang terbentuk	0,05	1	0,05	
7. Keterlibatan KTH dalam program pemerintahan	0,04	1	0,04	
8. Bentuk kearifan lokal dalam kegiatan KTH	0,04	1	0,04	
Total Kelemahan				0,57
Total	1,00			1,46

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 11 faktor internal yang berperan sebagai kekuatan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Maju Bersama di Desa Air Tenam, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Di antara faktor-faktor tersebut, dasar hukum pendirian KTH menjadi aspek yang paling dominan dengan skor tertinggi sebesar 0,32 (Tabel 3). Keberadaan badan hukum atau akta notaris sebagai landasan legalitas KTH Maju Bersama memberikan legitimasi yang kuat dalam menjalankan berbagai program pengelolaan hutan, memperkuat posisi kelompok dalam mengakses sumber daya, serta meningkatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat setempat. Menurut Alimuna dan Srifitrian (2022) bahwa kelompok tani hutan dengan struktur organisasi yang legal memiliki akses yang lebih baik terhadap program pemerintah dan dukungan finansial dalam upaya konservasi dan pemanfaatan hutan secara lestari

Faktor kelengkapan kesekretariatan KTH merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan pengelolaan hutan kemasyarakatan. Pada KTH Maju Bersama di Desa Air Tenam, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, faktor ini menjadi kekuatan terbesar kedua dengan skor 0,24 (Tabel 3). Kelengkapan kesekretariatan yang dimiliki, seperti papan nama KTH, papan informasi, pondok pertemuan, perpustakaan, peta wilayah kelola, dan struktur organisasi, menunjukkan adanya sistem administrasi yang tertata dengan baik. Keberadaan fasilitas ini berperan dalam meningkatkan koordinasi, transparansi, dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan (Oktoyoki *et al.*, 2023).

Kekuatan selanjutnya yang berpengaruh dalam melakukan pengelolaan hutan kemasyarakatan pada KTH Maju Bersama di Desa Air Tenam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Struktur kelembagaan KTH, Rencana kegiatan KTH, Aturan yang dimiliki KTH dan Keikutsertaan dalam kegiatan peningkatan kapasitas dengan masing-masing skor sebesar 0,21 (Tabel 4.17). Kelompok Tani Hutan Maju Bersama di Desa Air Tenam Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan struktur kelembagaan meliputi Ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi dengan uraian tugas dan semua berjalan sesuai fungsinya, serta AD/ART sebagai aturan kelompok dan dalam 2 tahun terakhir terdapat 3 orang pengurus/ anggota yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas (pelatihan/kursus/magang).

KTH Maju Bersama telah memiliki struktur kelembagaan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, serta seksi-seksi dengan tugas yang jelas, sehingga setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang terarah dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan hutan. Keberadaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) juga menjadi aspek krusial dalam menetapkan pedoman dan tata kelola organisasi, yang berfungsi untuk mengatur hak, kewajiban, serta mekanisme kerja dalam kelompok (Larasati *et al.*, 2021).

Selain struktur kelembagaan yang kuat, rencana kegiatan KTH menjadi elemen strategis dalam mengarahkan tujuan dan prioritas kelompok. Rencana kegiatan ini mencakup berbagai aspek, seperti pemanfaatan sumber daya hutan, pengelolaan hasil hutan, konservasi, serta program pemberdayaan anggota. Alimuna dan Srifitrian (2022) menyatakan bahwa perencanaan yang matang dalam kelompok tani hutan memungkinkan kegiatan dapat dijalankan secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga pemanfaatan hutan tetap sesuai dengan prinsip kelestarian. Selain itu, aturan yang dimiliki oleh KTH berperan penting dalam menciptakan disiplin dan kepatuhan anggota terhadap kebijakan yang telah disepakati bersama, sehingga konflik internal dapat diminimalkan dan tata kelola menjadi lebih efektif.

Keikutsertaan anggota dalam kegiatan peningkatan kapasitas juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kompetensi dan wawasan terkait pengelolaan hutan. Dalam dua tahun terakhir, sebanyak tiga orang pengurus atau anggota KTH Maju Bersama telah mengikuti berbagai program peningkatan kapasitas, seperti pelatihan, kursus, atau magang yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Zeilika *et al.* (2021) menekankan bahwa partisipasi dalam kegiatan peningkatan kapasitas memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan keterampilan teknis, pemahaman regulasi, serta inovasi dalam pengelolaan sumber daya hutan. Peningkatan kapasitas anggota juga

berperan dalam memperkuat kemandirian kelompok dalam mengelola hutan secara lestari, meningkatkan produktivitas hasil hutan, serta memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat delapan faktor internal yang teridentifikasi sebagai kelemahan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) pada KTH Maju Bersama di Desa Air Tenam, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Salah satu kelemahan utama adalah rendahnya pemahaman anggota terhadap batas-batas wilayah kelola dalam batas kawasan hutan di sekitarnya, dengan skor sebesar 0,12 (Tabel 3.17). Tingkat pemahaman anggota KTH Maju Bersama terhadap batas wilayah kelola masih berkisar antara 30–50%, yang dapat berdampak pada potensi konflik tata guna lahan serta kesulitan dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya hutan secara efektif. Menurut Ahmad *et al.* (2024), pemahaman yang baik mengenai batas wilayah pengelolaan hutan sangat penting dalam mendukung keberlanjutan program HKm, karena dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, mencegah tumpang tindih penggunaan lahan, serta memperkuat hak kelola kelompok tani hutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan sosialisasi lebih lanjut kepada anggota kelompok untuk meningkatkan kesadaran serta pemahaman mereka terhadap aspek batas wilayah pengelolaan hutan.

Kelemahan lain dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) pada KTH Maju Bersama di Desa Air Tenam, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan adalah rendahnya tingkat partisipasi anggota dan pengurus dalam pertemuan serta minimnya keterlibatan kaum wanita dalam kepengurusan. Faktor-faktor ini meliputi kehadiran anggota dalam pertemuan KTH, frekuensi pertemuan KTH, keikutsertaan kaum wanita dalam kepengurusan dan keanggotaan kelompok, serta kehadiran pengurus dalam pertemuan, masing-masing dengan skor sebesar 0,08 (Tabel 3). Tingkat kehadiran anggota dalam pertemuan masih kurang dari 30%, sementara frekuensi pertemuan hanya dilakukan setiap tiga bulan sekali. Selain itu, keterlibatan kaum wanita dalam kepengurusan dan sebagai anggota kelompok masih di bawah 10%, sedangkan kehadiran pengurus dalam pertemuan juga kurang dari 30%. Kondisi ini menunjukkan lemahnya aspek kelembagaan dalam kelompok yang berpotensi menghambat efektivitas pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Rendahnya tingkat partisipasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya pertemuan rutin, keterbatasan waktu anggota yang memiliki kesibukan lain, serta kurangnya insentif atau dorongan bagi anggota untuk aktif berpartisipasi. Keikutsertaan kaum wanita yang masih rendah juga menunjukkan bahwa peran gender dalam pengelolaan HKm belum dioptimalkan. Padahal, menurut penelitian Lispiani *et al.* (2022), keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk dalam kelembagaan hutan kemasyarakatan, berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas dan keberlanjutan program karena perempuan cenderung memiliki perhatian lebih terhadap aspek keberlanjutan dan konservasi.

Selain itu, pertemuan yang hanya dilakukan setiap tiga bulan sekali dapat berdampak pada kurangnya komunikasi dan koordinasi antar anggota, yang pada akhirnya dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan implementasi program kerja. Menurut Asmoro *et al.* (2021), kelompok tani hutan yang memiliki frekuensi pertemuan lebih tinggi cenderung memiliki tingkat keberhasilan yang lebih baik dalam pengelolaan hutan karena komunikasi yang intensif membantu dalam menyelesaikan masalah secara cepat serta meningkatkan keterlibatan anggota. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk meningkatkan partisipasi anggota dan pengurus, seperti peningkatan frekuensi pertemuan, pemberian insentif bagi anggota yang aktif, serta program pemberdayaan perempuan agar lebih banyak wanita terlibat dalam kepengurusan KTH. Dengan adanya peningkatan partisipasi dan frekuensi interaksi antar anggota, diharapkan pengelolaan HKm di KTH Maju Bersama dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

#### Faktor Eksternal

Analisis Faktor Internal (IFAS) dalam strategi pengelolaan hutan kemasyarakatan pada KTH Maju Bersama di Desa Air Tenam menunjukkan bahwa terdapat 6 faktor peluang yang tersedia dengan total skor 0,78, sedangkan ancaman yang dihadapi sebanyak 15 faktor dengan total skor 1,16. Dengan demikian, terdapat selisih sebesar -0,39, yang menunjukkan bahwa ancaman dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan lebih besar dibandingkan peluang yang ada.

Tabel 4. Matrik IFAS strategi pengelolaan hutan kemasyarakatan

Peluang	Bobot	Rating	Skor
1. Penandaan dan pemetaan wilayah kelola	0,03	3,81	0,12
2. Pemanfaatan wilayah kelola sesuai dengan potensi	0,03	3,91	0,13
3. Aktivitas kelompok dalam melakukan rehabilitasi	0,03	3,91	0,13
4. Kegiatan konservasi sumberdaya hutan oleh KTH	0,03	3,14	0,10
5. Dampak positif kegiatan terhadap lingkungan	0,03	3,02	0,10
6. Sumber informasi dan teknologi untuk mengembangkan usaha	0,07	2,88	0,21
<b>Total Peluang</b>			<b>0,78</b>
<b>Ancaman</b>			
1. Pengenalan potensi dan daya dukung wilayah kelola dan kawasan hutan di sekitarnya	0,03	2,16	0,07

2. Identifikasi dan pemetaan permasalahan wilayah kelola dan kawasan hutan di sekitarnya	0,03	1,93	0,06
3. Dampak kegiatan kelompok terhadap peningkatan kepedulian masyarakat dalam pelestarian hutan	0,03	2,21	0,07
4. Sertifikat pengelolaan hutan lestari	0,03	1,00	0,03
5. Kesesuaian komoditas dengan SNI	0,03	1,00	0,03
6. Pertambahan modal usaha	0,05	1,26	0,06
7. Sumber penambahan modal usaha	0,06	2,00	0,13
8. Jenis pengembangan usaha atau komoditas usaha	0,06	1,95	0,13
9. Temu usaha dengan pelaku usaha	0,07	1,12	0,08
10. Kerjasama usaha/kemitraan melalui perjanjian/ MoU	0,05	1,00	0,05
11. Skala pemasaran hasil usaha kelompok	0,05	1,81	0,09
12. Peningkatan pendapatan kelompok dari modal awal	0,05	1,00	0,05
13. Penyerapan tenaga kerja dari usaha kelompok	0,07	1,19	0,09
14. Peningkatan omset/pendapatan dari usaha atau produksi utama	0,07	2,16	0,16
15. Peningkatan omset/pendapatan dari usaha atau produksi turunan	0,07	1,09	0,08
<b>Total Ancaman</b>		<b>1,16</b>	
<b>Total</b>	<b>1,00</b>		<b>-0,39</b>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat enam faktor eksternal yang teridentifikasi sebagai peluang dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) pada KTH Maju Bersama di Desa Air Tenam, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Faktor dengan peluang terbesar adalah ketersediaan sumber informasi dan teknologi untuk mengembangkan usaha, dengan skor 0,21 (Tabel 5). Saat ini, KTH Maju Bersama telah memanfaatkan 2-3 sumber informasi dan teknologi, termasuk dari instansi teknis, lembaga penelitian, sektor swasta, serta akses internet, yang berperan dalam meningkatkan kapasitas kelompok dalam pengelolaan sumber daya hutan. Pemanfaatan sumber informasi dan teknologi yang tepat dapat mempercepat adopsi praktik pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan dan produktif. Menurut Suryatman *et al.* (2024), akses terhadap informasi dan teknologi sangat penting dalam mendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat, karena dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta daya saing kelompok tani hutan dalam mengelola hasil hutan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak dan peningkatan literasi digital menjadi strategi penting untuk memaksimalkan peluang ini dalam pengelolaan HKm.

Pemanfaatan wilayah kelola sesuai dengan potensi dan aktivitas kelompok dalam melakukan rehabilitasi merupakan peluang yang berpengaruh terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) pada KTH Maju Bersama di Desa Air Tenam, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan masing-masing skor sebesar 0,13 (Tabel 4). KTH Maju Bersama telah memiliki rencana pemanfaatan tertulis yang disusun berdasarkan potensi wilayah dan diketahui oleh para pihak terkait. Selain itu, kelompok ini juga aktif dalam melakukan rehabilitasi lahan dengan melaksanakan tiga kegiatan di luar aktivitas utama, seperti penanaman pada lahan kritis, penanaman turus jalan, serta penghijauan di sepanjang kanan dan kiri sungai. Upaya ini menunjukkan komitmen kelompok dalam meningkatkan fungsi ekologi wilayah kelola sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya hutan. Menurut Suhesti dan Hadinoto (2019), keberhasilan pengelolaan HKm sangat dipengaruhi oleh keterlibatan kelompok tani hutan dalam upaya rehabilitasi dan pemanfaatan lahan secara optimal sesuai dengan karakteristik ekosistem yang ada. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga pendukung lainnya, sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas kelompok dalam merealisasikan program rehabilitasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 15 faktor eksternal yang teridentifikasi sebagai ancaman dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) pada KTH Maju Bersama di Desa Air Tenam, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Ancaman terbesar yang dihadapi adalah rendahnya peningkatan omset atau pendapatan dari usaha atau produksi utama, dengan skor 0,16 (Tabel 4). Dalam tiga tahun terakhir, peningkatan omset atau pendapatan dari usaha utama KTH Maju Bersama masih kurang dari 25% dari modal usaha, menunjukkan bahwa kelompok ini menghadapi tantangan dalam meningkatkan profitabilitas dan keberlanjutan ekonominya.

Rendahnya peningkatan pendapatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan akses pasar, kurangnya inovasi dalam diversifikasi produk, serta kendala dalam permodalan dan investasi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi peningkatan kapasitas anggota, penguatan jaringan pemasaran, serta dukungan dari pemerintah dan sektor swasta dalam membantu kelompok tani hutan meningkatkan daya saing usaha mereka. Menurut Makkarennu *et al.* (2023), salah satu kunci keberhasilan HKm adalah pengelolaan usaha yang berbasis pada peningkatan nilai tambah produk hutan, akses ke pasar yang lebih luas, serta dukungan kebijakan yang berpihak pada kelompok tani hutan. Oleh karena itu, penguatan model bisnis dan diversifikasi usaha menjadi langkah strategis yang harus dilakukan untuk mengatasi ancaman ini dan mendorong keberlanjutan HKm.

Sumber penambahan modal usaha dan jenis pengembangan usaha atau komoditas usaha merupakan ancaman signifikan dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) pada KTH Maju Bersama di Desa Air Tenam, Kecamatan Ulu

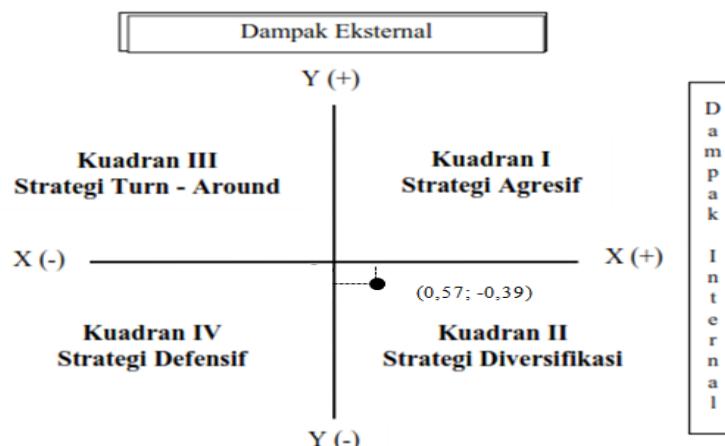
Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan masing-masing skor sebesar 0,13 (Tabel 5). Saat ini, sumber penambahan modal usaha KTH Maju Bersama masih bergantung pada bantuan dari pemerintah, yang cenderung bersifat tidak berkelanjutan dan terbatas dalam jumlah serta aksesibilitasnya. Ketergantungan ini dapat menghambat pengembangan usaha yang lebih mandiri dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Selain itu, dalam tiga tahun terakhir, KTH Maju Bersama hanya memiliki satu jenis pengembangan usaha atau komoditas usaha, yang mengindikasikan kurangnya diversifikasi dalam kegiatan ekonomi kelompok. Diversifikasi usaha dalam HKM sangat penting untuk mengurangi risiko ekonomi dan meningkatkan ketahanan kelompok dalam menghadapi fluktuasi pasar serta tantangan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperluas sumber pendanaan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan, koperasi, atau investor swasta, serta mendorong pengembangan usaha yang lebih beragam agar kelompok tani hutan dapat meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan usahanya. Dukungan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, akses permodalan alternatif, dan penguatan jaringan pasar dapat menjadi strategi yang efektif dalam mengatasi ancaman ini.

Ancaman berikutnya dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKM) pada KTH Maju Bersama di Desa Air Tenam, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, adalah skala pemasaran hasil usaha kelompok serta penyerapan tenaga kerja dari usaha kelompok, dengan masing-masing skor sebesar 0,09 (Tabel 4.18). Saat ini, pemasaran hasil usaha KTH Maju Bersama masih terbatas pada tingkat kabupaten, sehingga peluang untuk memperluas pasar ke skala provinsi atau nasional belum optimal. Keterbatasan ini dapat berdampak pada rendahnya pendapatan kelompok serta kurangnya daya saing produk di pasar yang lebih luas. Selain itu, hingga saat ini, usaha kelompok belum mampu menyerap tenaga kerja secara signifikan, yang menunjukkan bahwa pengelolaan usaha belum berkembang secara maksimal dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Menurut Fabiyola *et al.* (2023), peningkatan skala pemasaran dan optimalisasi penyerapan tenaga kerja dalam usaha berbasis masyarakat dapat dilakukan melalui strategi diversifikasi produk, peningkatan kualitas, serta penguatan jaringan distribusi dan promosi. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dalam bentuk akses pasar yang lebih luas, kerja sama dengan mitra bisnis, serta pelatihan dalam manajemen pemasaran dan pengelolaan usaha agar KTH Maju Bersama dapat lebih berkembang secara ekonomi dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

#### Pembobotan diagram SWOT faktor internal dan eksternal

Menurut hasil pembobotan dari diagram SWOT faktor internal dan eksternal, hasil analisis menunjukkan bahwa faktor internal kekuatan mencapai 2,03; faktor internal kelemahan mencapai 1,46; dengan selisih 0,57 dan faktor eksternal peluang mencapai 0,78 dan faktor eksternal ancaman mencapai 1,16, dengan selisih -0,39. Posisi strategi pengelolaan hutan kemasyarakatan pada KTH Maju Bersama di Desa Air Tenam, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan disajikan pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Posisi strategi pengelolaan hutan kemasyarakatan pada KTH Maju Bersama di Desa Air Tenam, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi strategi pengelolaan hutan kemasyarakatan pada KTH Maju Bersama di Desa Air Tenam, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan berada pada kuadran II dengan strategi Diversifikasi (S-T). Strategi S-T dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan untuk menghindari atau memperkecil dampak dari ancaman yang datang dari luar. Strategi prioritas untuk meningkatkan kelas Kinerja KTH Maju Bersama dari madya ke utama dengan menerapkan strategi S-T yaitu :

- 1 Memanfaatkan Legalitas dan Struktur Kelembagaan untuk Menguatkan Pengelolaan Wilayah Kelola

- 2 Mengoptimalkan Perencanaan dan Pemantauan Kegiatan untuk Meningkatkan Kesadaran Pelestarian dan Akses Modal
- 3 Meningkatkan Kapasitas SDM dan Kaderisasi untuk Menghadapi Tantangan Standarisasi Produk dan Pengembangan Usaha
- 4 Memperkuat Kesekretariatan dan Jejaring Kemitraan untuk Ekspansi Skala Pemasaran dan Kolaborasi Bisnis Mendorong Replikasi Usaha dan Inovasi Produk untuk Memperkuat Ketahanan Ekonomi Kelompok.

## KESIMPULAN

Kelompok Tani Hutan (KTH) Maju Bersama di Desa Air Tenam, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki skor kinerja kelola kelembagaan 205 (56,94%), kelola kawasan 131,28 (65,64%), dan kelola usaha 102,09 (23,20%), dengan total skor 438,37 (48,60%), sehingga termasuk dalam KTH kelas Madya (Baik/Menengah). Berdasarkan analisis SWOT posisi strategi pengelolaan hutan kemasyarakatan pada KTH Maju Bersama di Desa Air Tenam, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan berada pada kuadrant II dengan strategi Diversifikasi (S-T).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S., Sardjono, M. A., Setiawati, S., Purwanti, E., Kristiningrum, R., & Suhardiman, A.** 2024. Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam peningkatan kinerja Kelompok Perhutanan Sosial di Delta Mahakam. *Ulin - Jurnal Hutan Tropis*, 8(1), 170–182.
- Ajijah, L.N., R. Safe'I dan S.B Yuwono.** 2022. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan di HKM Harapan Sentosa KPHL Batutegi. *ULIN Jurnal Hutan Tropis*. 6(2):1-14. <http://dx.doi.org/10.32522/ujht.v6i2.8073>
- Alimuna, & Srifitriani, A.** 2022. Peran kelembagaan kelompok tani hutan (KTH) dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (Studi kasus Hutan Nanga-Nanga Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara). *Jurnal Georaflesia*, 7(1), 104–110.
- Amalia, A. S., & Maulana, A.** 2023. Evaluasi Program Perhutanan Sosial Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(3), 1–10. <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i3.124>
- Ananda, S.M., N. Valentino dan B. Setiawan.** 2023. Evaluasi Kinerja Hutan Kemasyarakatan Gapoktan Alam Lestari Resort Jangkok Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat. *AGROTEKSOS Agronomi Teknologi dan Sosial Ekonomi Pertanian*. 33(2) : 6-12. <https://doi.org/10.29303/agroteksos.v33i2.890>
- Arif, M., Sabri, P. Nagara dan Nasfi.** 2020. SWOT Analisis Dan Matrik Swot Analisis Dalam Rangka Pemasaran Produk Pendanaan Bank (Studi PT. BPR Rangkiang Aur). *Jurnal Point Equilibrium Manajemen & Akuntansi*. 2(1) : 21-35
- Arifandy, M. I., & Sihaloho, M.** 2015. Efektivitas pengelolaan hutan bersama masyarakat sebagai resolusi konflik sumber daya hutan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(1), 147–158.
- Asmoro, H., Sumardjo, S., Susanto, D., & Tjitropranoto, P.** 2021. Peningkatan kualitas pemberdayaan kelompok tani hutan dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 18(1), 15–25.
- BPS.** 2023. Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan 1 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu (Ribu ha), 2022. Bps.Go.Id. <https://bengkulu.bps.go.id/id/statistics-table/3/Umpod09GaG5RbTIOYTJwaVFXWnJPRmQ1Wm1wMVp6MDkjMw==/luas-kawasan-hutan-dan-konservasi-perairan-1t-sup-gt--1t-sup-gt--menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-bengkulu--ribu-ha---2022.html>
- Firmansyah, D dan Dede.** 2022. Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*. 1(2):85-114. <http://dx.doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>
- Gustika, D., Suwarno, E., & Insusanty, E.** 2020. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Kelompok Tani Hutan Mitra Upt Kphp Minas Tahura. *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan*, 15(1), 1–12. <https://doi.org/10.31849/forestra.v15i1.3641>
- Hariadi, D., Hesti Wulan, & Sonya Claudia Siwu.** 2023. Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(3), 428–447. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.276>
- Lispiani, B. M., Markum, & Hidayati, E.** 2022. Peran perempuan dalam pengelolaan hutan pada kelompok tani hutan Puncak Semaring Desa Mekar Sari Kabupaten Lombok Timur. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Kehutanan Indonesia*, 1(1), 139–147.

- Machali, I.** 2021. Metode Penelitian Kuantitatif : Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta.
- Makkarennu, Salim, S. A., Irnasari, Israwati, & Rahmiawati, V.** 2023. Model bisnis usaha berbasis hasil hutan bukan kayu potensial: Aplikasi penerapan Business Model Canvas. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Informatika (JBMI)*, 19(3), 205–222.
- Oktoyoki, H., Pratama, B., Safnizar, & Himawan, R.** 2023. Performansi kelompok tani hutan (KTH) dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan: Dimensi kelola kelembagaan, kawasan, dan usaha. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil: Jurnal Ilmu-Ilmu Kehutanan dan Pertanian*, 7(2), 210–220.
- Perka.** 2020. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kelompok Tani Hutan. In P2Sdm.
- Permen, L.** 2021. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1–268.
- Ridwan., M. Junus., M.A.S Mahbub dan RP Windarti.** 2018. Kinerja Kelompok Tani dalam Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat di Desa Bacu-Bacu Kabupaten Barru. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. 10(2): 231-238
- Rijal, S., Azis, A. A., Chusumastuti, D., Susanto, E., Nirawana, I. W. S., & Legito.** 2023. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi informasi bagi masyarakat. *Easta Journal of Innovative Community Services*, 1(3), 156–170.
- RPHJP KPHL.** 2015. Bengkulu Selatan tahun 2015.
- Suhesti, E., & Hadinoto.** 2019. Persepsi dan partisipasi kelompok tani hutan terhadap agroforestry di kawasan penyangga TAHURA Sutan Syarif Hasyim Riau. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 16(1), 13–23.
- Suryatman, Dasipah, E., Gantini, T., & Magistra, B. J.** 2024. Peran kelompok tani hutan (KTH), dan penerapan teknologi terhadap keberdayaan petani anggota KTH dan kontribusinya terhadap pendapatan usahatani kopi arabika (*Coffea sp.*). *Orchid Agri*, 4(2), 19–31.
- Utami, R. P., & Ratnaningsih, Y.** 2018. Implementasi kemitraan kehutanan antara kelompok tani dengan BKPH Rinjani Barat Pelangan Tastura. *Jurnal Silva Samalas*, 1(1), 35–44.
- Wijayanti, Y. N., I.U Tiara, dan W. Wijaya.** 2023. Faktor Penyebab Perambahan Hutan Di Kaki Gunung Kerinci Dalam Kawasan Tnks Di Desa Gunung Labu Kecamatan Kayu Aro Barat. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(2). <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i2.18027>
- Wijaya, B., H. Fauzi, dan Hafizianor.** 2021. Kinerja Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Di Kabupaten Tanah Laut. *Jurnal Sylva Scientiae*. 3(1) : 62-74
- Zeilika, E., Kaskoyo, H., & Wulandari, C.** 2021. Pengaruh partisipasi dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan terhadap kesejahteraan petani (Studi kasus Gapoktan Mandiri Lestari KPH VIII Batu Tegi). *Jurnal Hutan Tropis*, 9(2).